

**Standar Ganda Kebijakan AS Terhadap Irak dan Korea Utara
Atas Upaya Pengembangan Senjata Nuklir**
Oleh Donna Juliarti Simanjuntak

Pendahuluan

Tudingan sebagai “*Axis of Evil*” (Poros Kejahatan) oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Irak dan Korea Utara (Korut), terkait dengan upaya memiliki senjata pemusnah massal, dan dugaan AS atas dukungan mereka terhadap teroris internasional, ternyata tidak menyurutkan keinginan kedua negara tersebut untuk tetap melanjutkan program pengembangan senjata nuklir mereka. Sebelumnya, Irak menyatakan bersedia menerima pelucutan senjata pemusnah massalnya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) No. 687 (April 1991) mengenai pencabutan sanksi sekaitan penghancuran senjata pemusnah massal (*Koran Tempo*, 23-8-2002). Begitupun dengan Korut, yang pada 1994 mengadakan kesepakatan khusus dengan AS, yang intinya menyatakan kesediaannya menghentikan program persenjataan nuklirnya. Sebagai kompensasinya, AS akan membantu dana dan teknis pengembangan listrik bertenaga air (reaktor air ringan) di negara itu (*Kompas*, 11-3-1995).

Namun, beberapa waktu lalu (2003), Irak dan Korut menghidupkan kembali pengembangan senjata nuklir mereka yang dianggap berbahaya dan mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Semula, mereka menyangkal hal yang awalnya merupakan kecurigaan AS itu, sampai akhirnya Korut mengakui kebenaran isu tersebut. Sementara mengenai nuklir Irak, sampai saat ini belum terbukti kebenarannya, meskipun Tim Inspeksi Senjata PBB sudah didatangkan ke negeri itu atas persetujuan Saddam Husein, dan masih terus menyelidiki sampai batas waktu yang ditentukan.¹

Sama seperti sebelumnya, AS tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah senjata nuklir di Irak dan Korut. Hanya saja kali ini AS menerapkan standar ganda dalam kebijakan luar negerinya itu. Terhadap Irak, AS mengancam akan melakukan agresi militer jika Irak tidak segera mengakhiri program senjata pemusnah massalnya. Bahkan, yang mengherankan, meskipun nanti Tim Inspeksi PBB telah selesai menjalankan tugas pemeriksaannya di Irak dan ternyata tak terbukti bahwa Irak memang sedang mengembangkan program senjata nuklirnya, AS menyatakan akan tetap menyerang Irak.² Sementara terhadap Korut, sikap AS ternyata lebih lunak. AS menginginkan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan tidak akan menyerang negeri komunis itu. Kalaupun Korut membangkang, AS hanya akan mengancam dengan memberikan tekanan atau sanksi ekonomi.

Paradoks, memang, perbedaan sikap AS itu. Senjata nuklir Irak yang masih merupakan dugaan, oleh AS direspon dengan agresi militer. Sementara Korut yang jelas-jelas telah mengakui program

¹ Perkembangan teraktual, Irak akhirnya digempur oleh pasukan militer AS-Inggris, meski secara faktual tak pernah ditemukan tempat pengembangan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal itu. Setelah dinyatakan kalah perang (yang tak disetujui oleh PBB), pemerintah Irak utnuk sementara kini diambil-alih oleh AS.

² Hal itu, seperti diketahui, memang sudah terjadi. Hanya, saja, Presiden George W. Bush memberi alasan bahwa AS memerangi Irak dengan tujuan membangun negara itu menjadi negara yang demokratis dan berkeadilan.

nuklirnya, mendapat sikap yang lebih halus. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa AS menerapkan standar ganda dalam menghadapi ancaman nuklir Irak dan Korut itu?

Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, Zbigniew Brzezinski, kepada stasiun televisi CNN menyatakan bahwa ancaman nuklir Korut jauh lebih besar dibanding ancaman nuklir Irak. Dalam hal kemampuan militer pun, Korut jauh lebih mengancam dibanding Irak. Negeri komunis itu memiliki tentara yang jumlahnya mencapai satu juta personil dan ratusan rudal, termasuk sejumlah rudal yang bisa menghantam wilayah Jepang. Mantan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger, juga mengungkapkan hal yang senada. Untuk itu, pemerintah AS harus menanggapi ancaman Korut dengan tingkat keseriusan yang sama, atau bahkan lebih serius dibanding sikap pemerintah AS dalam menghadapi masalah Irak.³ Tetapi, mengapa sikap AS terhadap Korut malah lebih lunak ketimbang terhadap Irak? Adakah motif atau kepentingan tertentu di balik itu, di samping tujuan lain AS untuk mengakhiri program nuklir demi terciptanya tatanan internasional yang lebih baik, aman, dan damai?

Politik Luar Negeri AS dan Kebijaksanaannya

Sebagai negara adidaya, kepentingan dasar AS begitu luas rentangannya, bahkan mencakup dunia, yakni untuk menciptakan perdamaian dunia. Dua kepentingan nasionalnya yang relatif konstan selama Perang Dingin, bahkan sampai saat ini, ialah: 1) Perdamaian, kebebasan, dan kesejahteraan dunia; 2) Tatanan internasional yang menjamin terlaksananya hak penentuan nasib sendiri, hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Kedua kepentingan nasional itu, oleh AS, senantiasa diperjuangkan melalui kebijakan luar negerinya. Karena itulah politik luar negeri AS relatif mantap, terarah, dan konsisten.⁴ Politik luar negeri AS mempunyai dimensi-dimensi politik/diplomatik, ekonomi, sosial, dan militer. Dengan demikian ia meliputi berbagai kebijakan. Namun, yang terpenting adalah kebijakan diplomatik, kebijakan ekonomi, dan kebijakan militer, dengan fokusnya pada aspek keamanan baik nasional maupun internasional. Tujuan itu dicapai dengan berpedoman pada dua prinsip. Pertama, sejauh mungkin ditempuh jalan damai, melalui dialog dan diplomasi. Kedua, dalam menempuh jalan damai, kemampuan berperang mutlak harus terjamin. Oleh sebab itu, dialog dan diplomasi harus didukung dan ditopang oleh kekuatan militer yang mampu melindungi dan mempertahankan keamanan nasional AS khususnya, dan keamanan internasional umumnya.⁵

Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang memiliki kombinasi kemampuan militer, ekonomi, dan politik, yang mampu mempengaruhi perangai negara-negara lain di dunia – atau, dengan kata lain, memimpin dunia internasional. Negara adidaya ini juga merupakan gudang sumber ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak kering-keringnya. Itulah sebabnya, ia mampu mempengaruhi perkembangan dunia secara menyeluruh. Sementara negara-negara lain, yang manapun, tak dapat menandingi AS dalam kombinasi kekuatan yang diperlukan itu. Juga, tak ada negara lain manapun yang mempunyai pengalaman memimpin dunia selama setengah abad. Dengan sendirinya tidak ada negara lain yang memiliki bobot dan wibawa di kalangan negara-negara besar dunia. Berdasarkan itulah dapat

³ Lihat artikel “Korut lebih berbahaya dibanding Irak” dalam *Media Indonesia*, 22 Oktober 2002.

⁴ Lihat tulisan Hasnan Habib, “Peranan Amerika Serikat dalam Menciptakan Stabilitas Global” dalam *Jurnal Studi Amerika*, Vol. III, Jan-Des, 1997, hal. 61.

⁵ *Ibid.*

dikatakan bahwa AS memang pantas dan seyogianya memainkan peran yang penting dalam membawa dunia ini ke tujuan-tujuan yang sesuai cita-cita umat manusia.⁶

Dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, peran AS sangat dominan melalui kebijakan-kebijakan luar negerinya yang mengatasnamakan kepentingan manusia. Intervensi kemanusiaan itu diupayakan melalui diplomasi yang melibatkan organisasi-organisasi internasional dan regional, serta negara-negara lain di dunia, untuk ikut serta mendukung kebijakan AS itu. Bahkan dengan kekuatan hegemoninya, AS tidak segan-segan melakukan intervensi militer terhadap negara-negara yang tidak mendukung terciptanya kehidupan internasional yang aman dan damai.

Pemerintah Presiden Bush menilai bahwa perdamaian merupakan kondisi utama dan terpenting bagi kelanjutan kesejahteraan dan kebebasan, dan selanjutnya melalui penekanan hal ini diharapkan dunia akan lebih demokratis. Untuk itu Bush selalu menekankan pentingnya *strengthening the allies* seperti, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Barat sekutu tradisional AS. Sebaliknya, AS akan lebih tegas menghadapi negara yang berpotensi mengancam kepentingan nasionalnya, seperti Cina dan sejumlah *rogue state* (negara “poros kejahatan”) seperti Irak, Korea Utara, Libya dan Kuba.⁷

Maka, tidaklah heran jika AS saat ini bersikap tegas terhadap Irak dan Korut. Selain karena kedua negara “Poros Kejahatan” itu menghidupkan kembali program pengembangan nuklirnya yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia, juga karena keduanya dianggap sebagai pengancam kepentingan nasional AS. Sesungguhnya, peningkatan kekuatan militer dan pengembangan senjata nuklir Korut memang tidak hanya mengancam stabilitas keamanan Asia Timur, membahayakan Korea Selatan (Korsel) dan Jepang, tapi juga dapat merongrong peran politik dan militer hegemonik AS. Bagi AS, peran hegemoniknya sangat krusial untuk menjaga stabilitas keamanan di Asia Timur dan sekaligus melindungi sekutunya, Jepang dan Korea Selatan (*Republika*, 3-2-1994). Demikian pula dengan Irak, AS menganggap kepemimpinan Saddam Hussin, orang kuat di Irak dan wilayah Timur Tengah yang otoriter dan tanpa batas itu, dapat menghalangi keinginan AS untuk mengukuhkan hegemoninya di Timur Tengah.

Alasan AS Menerapkan Standar Ganda

Meskipun fakta menunjukkan bahwa Irak dan Korut saat ini memiliki senjata pemusnah masal, namun menurut AS, keduanya tidak bisa diperbandingkan. Donald Rumsfeld, Menteri Pertahanan AS, mengatakan, bahwa Irak adalah penyerang yang agresif, yang melakukan serangan militer terhadap negara tetangganya. Irak juga menunjukkan kemauannya untuk menggunakan senjata penghancur masal (*Media Indonesia*, 19-10-2002). “Sejumlah negara teroris mengembangkan senjata penghancur masal, seperti Iran, Libya, Korut, Syria. Tapi, tidak ada negara teroris yang menjadi ancaman besar bagi keamanan warga negara kami dan stabilitas dunia, selain rezim Saddam Hussein di Irak”, tandas Rumsfeld.

Rezim Irak memang “unik”, karena mereka telah mengagresi negara-negara tetangganya, menggunakan senjata kimia bagi warganya sendiri, menyiksa bangsa Irak, melakukan serangan teroris, berbohong kepada tim penyelidik persenjataan dan melanggar Resolusi PBB. Juru Bicara Departemen

⁶ *Ibid*, hal. 69.

⁷ Lihat artikel Agus Widjojo, “Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Implikasinya”, *Jurnal Studi Amerika*, Vol VII, Juli-Des, 2001, hal. 43.

Luar Negeri AS, Richard Bouche, menjelaskan tentang perbedaan sikap AS terhadap Irak dan Korut terkait dengan masalah nuklir itu. Menurut dia, tidak ada sebuah kebijakan pun yang bisa diterapkan pada semua situasi. AS menginginkan adanya kesesuaian dengan situasi (*Republika*, 19-10-2002).

Menanggapi *statement* Rumsfeld di atas, perihal kemauan Irak untuk menggunakan senjata penghancur masal, menurut saya, tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa Korut tidak menunjukkan kemauannya untuk menggunakan senjata penghancur masal. Memang, dalam hal mengagresi negara-negara tetangganya, Korut tidak terbukti – bahkan kemampuannya untuk melakukan hal itu pun diragukan. Namun mengingat ancaman Korut terhadap AS, yaitu jika AS bersikeras dalam upayanya menekan dan membuat Korut tidak berdaya dengan kekuatan militernya, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengambil tindakan balasan yang lebih keras (*The Jakarta Post*, 24/10/2002). Selain itu, pelanggaran Korut terhadap Konvensi Nuklir Internasional dan Kesepakatan Khusus dengan AS tahun 1994 mengenai penghentian program senjata nuklirnya, yang kemudian pada 2002 Korut menghidupkan kembali program pengembangan senjata nuklirnya itu (*Kompas*, 13-12-2002), jelas menunjukkan adanya kemungkinan besar Korut juga mau menggunakan senjata penghancur masalnya. Dan tampaknya, ancaman itu tidak main-main.

Adapun alasan Korut melanggar Perjanjian 1994 adalah karena ia merasa jengkel dipencundangi terus menerus oleh AS, sekaitan dengan proyek nuklir air ringannya yang tertunda sejak tiga tahun lampau dan tak bisa segera diteruskan. Proyek nuklir air ringan senilai 4,6 miliar dolar itu dirancang sebagai kompensasi dari AS kepada Korut, yang bersedia untuk tidak meneruskan rencana pembangunan reaktor nuklirnya yang dapat memproduksi bom atom dan senjata nuklir lainnya. Sementara itu, pihak Washington sendiri mengaku bahwa sejak 1994 merasa terus dikangkangi karena terbukti Pyongyang terus mengujicobakan rudal-rudal jarak menengah dan balistiknya. Pada 31 Agustus 1998, Jepang, AS dan dunia dikejutkan ketika Pyongyang menembakkan rudal Taepodong I-nya yang jatuh di utara Jepang-Samudera Pasifik. Meskipun Korut membantah bahwa hal itu hanya uji coba roket yang gagal mengorbit, namun intelijen AS dan Jepang meyakini benar bahwa yang terjatuh di utara Jepang itu adalah sebuah rudal yang ditembakkan. Rudal Taepodong I berdaya tembak 1.640 km – jarak yang semakin mendekati AS.⁸

Korut sendiri, dalam hal menghidupkan kembali program pengembangan senjata nuklirnya itu, tentu bukan tanpa maksud dan alasan. Demikian pula dengan pengakuannya pada dunia internasional mengenai program nuklirnya itu. Pada tahun-tahun terakhir ini, pemerintah Korut memang tengah terbelenggu oleh masalah ekonomi, termasuk wabah kelaparan serta kegagalan panen dan ambruknya sistem perekonomian terencana, yang terbukti di negara komunis manapun kurang mampu memberikan kemakmuran bagi warganya (*Kompas*, 19-9-2002). Korut berharap pengembangan senjata baru itu dapat menjadi jalan untuk membangun kehidupan yang lebih baik untuk Korut di masyarakat dunia.

Sementara itu, Howard W. French menyebutkan bahwa kemungkinan besar pengakuan Korut itu merupakan langkah yang sedang diambil oleh pemimpin yang sedang putus asa. Kenyataannya, Korut memang sedang hidup di dunia yang sudah banyak berubah. Kini tidak ada lagi Uni Soviet yang menjadi mitra dagang utamanya, sementara RRC kian menjauh. Tetangganya, Korsel, kini jauh lebih kaya dan musuh historiknya, AS, menjadi satu-satunya adidaya di dunia. Di sisi lain, pihaknya sendiri semakin menurun dalam hal ekonomi dan kerap dilanda bencana alam serta gagal panen. Disebabkan hal itulah

⁸ Lihat artikel Aco Manafe, "Pyongyang Mudah Memprovokasi Washington", *Suara Pembaruan*, 1 November 2002.

sangat mungkin pemimpin Korut, Kim Jong-Il, tiba-tiba merasa dirinya sangat terancam. Meski ia telah berupaya membuka perekonomian Korut Khususnya lebih terbuka terhadap Seoul (Korsel) dan Tokyo (Jepang), demi mengesankan dirinya sebagai pemimpin baru dan Pyongyang bukanlah ancaman bagi negara-negara lain, tetap saja ada perasaan kurang aman. Upaya membuka diri itu sendiri ditunjukkan kepada negara-negara lain yang ingin dimintai bantuannya, khususnya AS, yang mengontrol banyak lembaga keuangan internasional seperti IMF, IBRD, dan lainnya. Selain berharap bisa mendapat bantuan langsung dari AS, Pyongyang juga mengharapkan adanya pengertian dari negara adidaya ini untuk dapat membantunya masuk ke dalam sistem ekonomi global.⁹

AS sendiri, dalam menghadapi ancaman nuklir Korut, merasa yakin bahwa tekanan diplomatik terhadap negara itu akan lebih menguntungkan daripada menggunakan aksi militer. AS menginginkan penyelesaian damai dan mengharapkan kerja sama Korut agar normalisasi hubungan mereka yang bersitegang sejak berakhirnya Perang Dingin (1991) dapat terwujud. AS meminta Korut menghentikan program nuklirnya yang berbahaya serta mengancam perdamaian dan keamanan dunia itu dengan kompensasi bantuan ekonomi sebesar-besarnya, agar Korut dapat memulihkan kehidupan rakyatnya dan kondisi perekonomiannya.

Jika situasi sedemikian tercipta, maka AS pun tetap dapat mempertahankan kehadirannya di Jepang dan Korsel untuk mengimbangi kekuatan Cina di Asia Timur yang notabene masih menopang Korut karena kesamaan mereka sebagai negara komunis. Sebaliknya, Jepang dan Korsel yang merupakan sekutu AS menegaskan bahwa upaya melanjutkan program nuklir justru akan membuat Korut sulit untuk terus mendapat bantuan, bahkan pembicaraan normalisasi hubungan antara kedua negara pun bisa jadi terhenti. Di samping itu, timbul kekhawatiran akan dampak nuklir Korut yang dapat memperkeruh situasi di Semenanjung Korea yang masih belum stabil pasca Perang Korea (1950-1953).

Alasan AS tidak melancarkan agresi militer terhadap Korut adalah biaya yang dikeluarkan untuk memerangi negeri komunis itu cukup mahal, mengingat Korut memiliki kekuatan 1,7 juta tentara, persenjataan rudal, pesawat tempur, dan kemampuan perang lainnya yang dirasa akan sangat sulit bagi AS. Alasan lainnya adalah, kemungkinan Korut bisa menjadi “kesetanan” jika sampai diserang. Sebagai negara yang banyak kehilangan harapan, Korut bisa melakukan apa saja, termasuk menghancurkan diri sendiri. Jika diserang, Korut akan membalas, dan hal itu bisa mencelakakan penduduk Seoul yang jumlahnya 10 juta jiwa. Seoul berada dalam jangkauan tembakan dari zona demiliterisasi di perbatasan. Tentu hal itu harus dipertimbangkan risikonya, karena serangan terhadap Korut justru dapat menyebabkan angka kematian yang menyebar dan meracuni wilayah yang luas, jauh dari teritorial Korut (*Kompas*, 13-12-2002).

Motif Lain Penyerangan Irak

Diasumsikan bahwa tujuan AS menghentikan program pengembangan dan penggunaan senjata nuklir adalah demi terciptanya perdamaian dan keamanan dunia, serta lingkungan hidup yang kondusif bagi seluruh umat manusia. Namun, jika hal itu benar, mengapa AS hanya menyerang Irak agar negara itu segera mengakhiri program nuklirnya dan melucuti semua senjata pemusnah massal? Bukankah ada beberapa negara lain yang juga memiliki senjata pemusnah massal dan fasilitas pengembangan nuklir,

⁹ Analisis Howard W. French, *International Herald Tribune* (22-10) dalam wacana, “Setelah Pyongyang Mengaku Memiliki Program Senjata Atom”, seperti dikutip *Kompas*, 23 Oktober 2002.

yang tidak menutup kemungkinan juga dapat mengancam keamanan internasional bila diaktifkan? Sebut saja India dan Pakistan yang kini bermitra dengan AS. Begitupun Israel, satu-satunya negara di Timur Tengah yang mengembangkan senjata nuklir. Bahkan AS sendiri, tentunya juga harus menyerang instalasi dan laboratorium senjata biologi dan nuklirnya sendiri.

Di balik sikap ngotot AS untuk menyerang Irak, dengan atau tanpa Resolusi PBB dan dengan atau tanpa dukungan internasional, ternyata ada motif lain yang lebih kuat daripada sekedar masalah nuklir. Yakni, AS ingin mendongkel Saddam Hussein dengan alasan ia dituduh telah bekerja sama dengan organisasi teroris Al Qaeda. Tanpa menghancurkan rezim Saddam Hussein, penumpasan Al Qaeda di Afghanistan mempunyai dampak yang terbatas jangkauannya. Tapi, karena AS sulit membuktikan kerja sama erat antara Osama bin Laden dan Saddam Hussein, maka alasan tersebut tidak dikembangkan lebih lanjut.

Kemudian, diajukan alasan lain: Irak memiliki senjata-senjata biokimia dan juga senjata nuklir taktis.¹⁰ Adapun tuduhan bahwa Irak mendukung terorisme internasional mungkin terkait dengan sikap Irak yang tidak memperlihatkan simpatinya terhadap AS terkait dengan serangan terorisme di New York dan Washington pada 11 September 2001, di samping sikap Irak yang mendukung aksi berjibaku Palestina melawan Israel.¹¹ Tapi, ada juga yang berpandangan bahwa AS memiliki agenda ekonomi yang disembunyikan di balik rencananya mendongkel Saddam. Agenda itu adalah kepentingan ekonomi dan geopolitik AS dalam percaturan politik dunia yang lebih besar. Muncul spekulasi, AS tergiur atas kekayaan minyak Irak yang begitu besar (Irak merupakan produsen minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi). Sementara, Presiden Saddam Hussein dianggap sebagai penghalang demi terwujudnya keinginan itu, sehingga harus disingkirkan. Jika rencana itu berhasil, AS dapat mengontrol minyak Irak dan hegemoni AS di Timur Tengah pun akan semakin mantap, yang tentunya juga akan membuat negara-negara sekutunya (seperti Uni Eropa dan Jepang khususnya) mengakui hegemoni AS sebagai pelindung kepentingan mereka.

Timur Tengah memang dianggap memiliki posisi strategis dalam pemikiran politik luar negeri AS, karena peranan minyak dan gas alam yang menjadi kian penting bagi kelangsungan industri dan ekonomi Barat sejak Perang Dunia II (1939-1945) keuntungan yang diperoleh konsorsium AS dalam pertambangan minyak di kawasan itu merupakan suatu faktor penting bagi stabilitas ekonomi negaranya. Minyak menjadi kebutuhan yang amat vital bagi jalannya industri AS, sehingga tidak heran bila negara ini menjadi konsumen minyak terbesar di dunia.¹²

Tetapi, mengapa AS juga tidak menyerang monarki absolut Arab Saudi, yang otomatis dipimpin pula oleh seorang diktator dan notabene merupakan teman baik AS, jika ia memang benar-benar ingin “menurunkan rezim yang diktator” dari panggung politik dunia sehubungan dengan niatnya memperluas demokrasi ke seluruh dunia? Jawaban yang dapat diberikan: karena Arab Saudi juga memusuhi Irak. Hal itu terkait dengan peristiwa semasa Perang Teluk II, yang diawali oleh invasi Irak ke Kuwait (1990). Saat itu Irak juga mengancam akan menyerbu Arab Saudi, tapi kemudian AS berhasil

¹⁰ Mengutip dari artikel Sabam Siagian, “AS Mau Dongkel Saddam”, Suara Pembaruan 10 Agustus 2002

¹¹ Lihat artikel Smith Alhadar, “Dari Palestina ke Irak, atau Sebaliknya?” dalam Koran Tempo, 23 Agustus 2002

¹² Sidik Jatmika, “SD Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat”, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2001, hal. 161, 162, 165.

mengusir tentara Irak dari Kuwait melalui “Operasi Badai Gurun” (1991). Sejak itu, baik Arab Saudi maupun Kuwait menganggap Irak sebagai ancaman, sebaliknya AS merupakan sekutu mereka.

Bisa dikatakan, AS berhasil mempengaruhi kedua monarki itu untuk bersekutu dan membuat mereka tunduk pada hegemoni AS. Hal itu tentu memberikan keuntungan besar bagi AS. Karena, Arab Saudi merupakan monarki terbesar di Teluk Persia yang kaya akan minyak. Sistem monarki absolut juga relatif kondusif bagi terjaganya kontinuitas pemenuhan kepentingan nasional AS. Sistem ini pada umumnya berhaluan politik konservatif dan *status quo*. Artinya, mereka cenderung memelihara kemapanan hubungan internasional yang ada dan menghindari berbagai perubahan, apalagi yang bersifat radikal. Tentu saja hal ini amat mendukung kontinuitas dominasi AS di kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah sebagai wilayah pengaruhnya (*sphere of influence*).¹³ Jadi, sesungguhnya bukan rezim yang demokratislah yang menjadi tuntutan AS terhadap Irak, melainkan rezim yang pro-Barat – khususnya pro-AS.

Standar Ganda AS sebagai Bentuk Kontra-Demokrasi

Kebijakan standar ganda AS terhadap Irak dan Korut sekaitan masalah senjata nuklir jelas menunjukkan sikapnya yang kontra-demokratis, meski ia sendiri selalu menyebut dirinya sebagai negara demokratis ideal. Pertama, jika AS benar-benar menggempur Irak,¹⁴ maka akan banyak korban berjatuh (khususnya warga sipil Irak). Hal itu dengan sendirinya menunjukkan pelanggaran HAM oleh AS terhadap rakyat Irak, khususnya untuk hidup bebas, lepas dari ketakutan, dan untuk memperoleh rasa aman dan damai. Kedua, agresi militer AS di Irak juga akan mengancam perdamaian dan keamanan internasional yang justru merupakan cita-cita seluruh umat manusia di dunia, yang karena itu mereka sangat menentang keras keputusan AS menyerang Irak. Namun, AS bersikeras dan tidak mau memperhatikan opini mayoritas masyarakat internasional itu, lantaran kesombongannya dan menganggap keputusannya yang terbaik. Ketiga, jika AS ingin mewujudkan tatanan internasional yang demokratis, semestinya upaya itu dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Misalnya saja, terhadap Arab Saudi yang otoritarian, AS membelanya mati-matian dan tidak mempersalahkan kediktatoran pemimpinnya. Dalam konteks ini jelas AS tidak konsisten. Tapi, penyebabnya mudah diduga: karena hubungan keduanya sangat dekat dan monarki Arab dapat mendukung kontinuitas pemenuhan kebutuhan vital AS, yaitu minyak. Memang, bagi AS, yang terutama adalah kepentingan nasionalnya tidak terancam.

Sebaliknya, Saddam Hussein yang dikenal sebagai orang terkuat di Irak dan Timur Tengah dan tidak mau bekerja sama dengan AS, dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan nasional AS sehingga harus disingkirkan. AS ingin Irak berada dalam pengaruhnya demi memantapkan hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Seandainya Hussein pada akhirnya mau diajak bekerja sama dengan AS, apakah AS tetap akan menyerang Irak dan mendongkel kepemimpinannya demi terjadinya *rezime change*? Saya yakin, tidak! Mengapa? Karena kepentingan AS tidak lagi terancam. Di dalam hal inilah nampak bahwa sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia, AS kerap ingin memaksakan kehendaknya sendiri dengan cara mendikte kepentingannya pada negara-negara lain.

Keempat, dalam era demokrasi, segala sesuatu idealnya diterapkan secara adil dalam lingkup mondial. Kalau AS bisa menuntut Irak dan Korut untuk tidak memiliki senjata nuklir, lantas atas dasar

¹³ Ibid, hal. 157-158

¹⁴ Kenyataannya hal itu memang sudah terjadi. Bahkan Inggris membantu AS dalam memerangi Irak.

apa AS boleh memilikinya? Dunia pasti percaya kalau nuklir AS selaku *super power* lebih unggul dan juga berbahaya. Coba kita *flash back* sejenak, antara tahun 1945-1989, AS terlibat dalam sembilan upaya diplomasi nuklir yang bersifat memaksa. Upaya-upaya untuk menggunakan kekuatan nuklir AS dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku Uni Soviet dan Cina menyangkut berbagai pidato, kesiagaan, dan gerakan dari pasukan-pasukan strategisnya. AS melakukan berbagai tindakan demikian itu dalam konflik-konflik yang melibatkan ancaman terhadap para sekutunya dan dalam konflik-konflik di mana pasukan konvensional dianggap tidak mungkin disiagakan.¹⁵ Tentunya hal itu merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia. Kalau AS merasa dirinya berhak atas kepemilikan senjata nuklir demi melindungi kepentingan nasionalnya, bagaimana dengan negara-negara lain, yang tentunya juga ingin melindungi kepentingan nasional mereka sendiri?

Penutup

Perdebatan mengenai kebijakan standar ganda AS memang tiada habisnya, karena akan selalu menimbulkan banyak pertanyaan dan menyisakan persoalan. Misalnya: apakah AS memang merupakan negara demokratis yang ideal atau sudahkan AS sungguh-sungguh demokratis? Lalu, apakah sesungguhnya makna “*democracy*” itu di mata AS dan bagaimana pelaksanaannya?

Menurut hemat saya, AS belumlah sepenuhnya demokratis. Mungkin saja kehidupan di dalam negerinya sendiri sudah melukiskan suatu masyarakat di mana nilai-nilai demokrasi berkembang subur di dalamnya. Misalnya kebebasan berpendapat, berekspresi, mengejar kekayaan, mencapai prestasi, dan pemilihan presiden yang berkala. Tapi, dalam hubungannya ke luar, tidak jarang kebijakan luar negeri AS melahirkan sikap pro dan kontra dari masyarakat internasional. Contohnya dapat dilihat dalam masalah nuklir Irak dan Korut ini. Ada kesan bahwa AS lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya. Di balik segala upaya yang dilakukan atas nama kemanusiaan, perdamaian dunia, dan demokratisasi, sesungguhnya tersimpan tujuan utama AS untuk memenuhi kepentingannya dan mencapai cita-citanya, yakni memperkaya negaranya dan memantapkan hegemoninya di seluruh dunia. Sehingga, dengan begitu, dunia semakin mengakui status dan eksistensinya sebagai satu-satunya negara *super power* yang tidak tertandingi.

Terlepas dari hal itu, kiranya disadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk demokrasi sekalipun. Sebagai suatu sistem, demokrasi adalah yang terbaik, namun bukan berarti sempurna. Mengapa? Karena demokrasi juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Salah satunya nampak dalam mekanisme pengambilan keputusan. Dalam sistem demokrasi, suara mayoritaslah yang menang dan lebih berhak, sementara yang minoritas, haknya kerap terabaikan. Oleh karena itu, sangatlah manusiawi jika AS sebagai negara dengan sistem yang “tidak sempurna” itu banyak melakukan kekeliruan. Jadi, bila demokrasi itu sendiri sebagai suatu sistem tidaklah sempurna, apalagi negara yang menerapkan sistem tersebut.

Kembali ke masalah nuklir Irak dan Korut, menurut saya, solusi yang terbaik adalah melalui jalur diplomasi, baik terhadap Korut maupun terhadap Irak. Agresi militer hanya akan memperkeruh suasana dan membuat kekacauan, belum lagi sikap Irak yang nantinya akan semakin antipasti terhadap AS.

¹⁵ Lihat Richard K. Betts, *Nuclear Blackmail and Nuclear Balance* (Washington DC: The Brookings Institution), dikutip oleh Joseph S. Nye, Jr., *Memimpin Dunia: Sifat Kekuatan Amerika yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 98.

Dampak yang ditimbulkan pun tidak hanya dirasakan oleh AS dan Irak, tapi juga oleh negara-negara lain. Misalnya, melonjaknya harga minyak akibat embargo yang dilakukan Hussein. Padahal, minyak merupakan kebutuhan vital banyak negara di dunia, tak hirau negara miskin, negara berkembang, maupun negara maju.

Saya setuju dengan AS bahwa senjata nuklir tidak perlu lagi digunakan demi tercapainya perdamaian dan keamanan dunia. Untuk itu diperlukan kesadaran dan komitmen bersama dari semua negara di dunia, termasuk AS, untuk segera melucuti senjata nuklir yang dimiliki.

Daftar Pustaka

Nye, Jr, Joseph S. *Memimpin Dunia: Sifat Kekuatan Amerika Yang Berubah*.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992

Jatmika, Sidik, *AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*,
Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000

Jurnal Studi Amerika, Vol. III, Jan-Des, 1997.

_____, Vol. VII, Jul-Des, 2001

Kompas, 11 Maret 1995

_____, 19 September 2002

_____, 23 Oktober 2002.

_____, 13 Desember 2002.

Koran Tempo, 23 Agustus 2002.

_____, 14 September 2002.

Media Indonesia, 19 Oktober 2002.

_____, 22 Oktober 2002.

Republika, 3 Februari 1994.

_____, 19 Oktober 2002.

Suara Pembaruan, 10 Agustus 2002.

_____, 1 November 2002.

The Jakarta Post, 24 Oktober 2002

_____, 9 Desember 2002